

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN BEDAH MAYAT
FORENSIK DI RUMAH SAKIT SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN(STUDI KASUSDI RS BHAYANGKARA AMBON)**



diajukan oleh
Bambang Prasetya
NIM 21.C2.0129

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN BEDAH MAYAT FORENSIK DI RUMAH SAKIT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS DI RS BHAYANGKARA AMBON)

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Bambang Prasetya
NIM 21.C2.0129

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Bedah Mayat Forensik Di Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan implementasinya masih menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum sebagai dasar hukum pelaksanaannya, hal ini disebabkan belum adanya aturan pelaksanaan yang baru setelah berlakunya Undang-Undang Kesehatan yang baru.

Rumah Sakit Bhayangkara Ambon memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang lain, yaitu memiliki kompartemen Dokpol. Di dokpol inilah kegiatan bedah mayat forensik dilaksanakan.

Rumusan masalah penelitian ini meliputi, Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Bedah Mayat Forensik di Rumah Sakit Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan? Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Bedah Mayat Forensik di Rumah Sakit Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan? dan Faktor-faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Bedah Mayat Forensik di Rumah Sakit Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Studi Kasus di RS Bhayangkara Ambon)? . Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Bedah Mayat Forensik di Rumah Sakit Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Penelitian ini memakai metode *sosiolegal research* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan desain penelitian kualitatif. Jenis data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Data dianalisis dengan Analisa kualitatif. Kesimpulannya adalah Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Bedah Mayat Forensik di Rumah Sakit Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan di RS Bhayangkara Ambon telah dilaksanakan oleh subyek-subyek yang terkait dalam implementasi dengan efektif dan efisien, meliputi bentuk Perlindungan Hukum, mekanisme Implementasinya terdiri dari 19 butir implementasi Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Bedah Mayat Forensik di Rumah Sakit, Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan di RS Bhayangkara Ambon.

Kata kunci: Perlindungan hukum, bedah mayat forensik, Undang-Undang Kesehatan

ABSTRAC

Legal Protection in the Implementation of Forensic Autopsy at Bhayangkara Ambon Hospital After the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health, the implementation of which still uses the Regulation of the Minister of Health Number: 38 of 2022 concerning Medical Services for Legal Purposes as the legal basis for its implementation, this is due to the absence of new implementation rules after the enactment of the new Health Law.

Bhayangkara Ambon Hospital has a specificity that is not owned by other government hospitals or private hospitals, namely having a Dokpol compartment. It is in this docpol that forensic autopsy activities are carried out.

The formulation of this research problem includes, How are the Arrangements for Legal Protection in the Implementation of Forensic Cadaver Surgery in Hospitals After the Enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health? How is the Implementation of Legal Protection in Forensic Autopsy in Hospitals After the Enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health? and What Factors Affect the Implementation of Legal Protection in the Implementation of Forensic Autopsy in Hospitals After the Enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health (Case Study at Bhayangkara Ambon Hospital)? . The Purpose of the Study is to Find Out How Legal Protection is Implemented in Forensic Cadaver Surgery in Hospitals After the Enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health

This study uses a sociolegal research method with analytical descriptive research specifications, with a qualitative research design. The type of data is in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection methods include literature studies and field studies. The data was analyzed by Qualitative Analysis. The conclusion is that the Implementation of Legal Protection in Forensic Cadaver Surgery in Hospitals After the Enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health at Bhayangkara Ambon Hospital has been implemented by the subjects involved in the implementation effectively and efficiently, including the form of Legal Protection, the implementation mechanism consists of 19 items of implementation of Legal Protection in the Implementation of Forensic Cadaver Surgery in Hospitals, After the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health at Bhayangkara Ambon Hospital.

Keywords: Legal protection, forensic autopsy, Health Law